Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA
Dr. Hera Nugrahayu, M.Si.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan tepat waktu.

Hasil dari Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada *result*, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di masa datang.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Palangka Raya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Palangka Raya dengan berlandaskan prinsip Isen Mulang sebagai Kota yang Maju, Rukun, dan Sejahtera untuk semua.

Palangka Raya, Maret 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA

[illegible]AHERA NUGRAHAYU

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	81.16	81.95	0.973
2	Angka Kemiskinan	3.61	3.44	-4.709
3	Angka Pengangguran	5.64	5.13	-9.043
4	Pertumbuhan Ekonomi	6.25	6.57	5.12
5	Pendapatan per Kapita	9.19	7.65	-16.757
6	Ketimpangan Pendapatan	0.383	0.31	-19.06

Sumber data : BPS Kota Palangka Raya, 2024

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

   A. Capaian Kinerja Outcome

   Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,46	96,78
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,34	97,37

3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,79	96,85
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,47	96,45

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (2024)
https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Anggaran belanja urusan Pendidikan di Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebesar Rp. 375.218.619.235 yang direalisasikan melalui Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sebesar Rp. 347.100.004.420,15 (92,51%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan
   - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Kualitas Tenaga Kependidikan yang tidak
b. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya
c. Tidak Meratanya Kualitas Pelaporan Keuangan Sekolah
d. Lokasi Satuan Pendidikan yang berada pada wilayah pinggiran, sehingga kualitas pendidikan berbeda disatu tempat dengan tempat lainnya.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,39	3,35
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	70	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,25	95,35
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,56	92,18
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85,66	94,27
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	81,34	93,92
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,44	95,32
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,99	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,10	90,25
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,53	96,68
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,79	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	88,96	94,90
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	91,00	100

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (2024)
https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran urusan Kesehatan di Kota Palangka Raya sebesar pada tahun 2023 Rp. 348.563.891.029 dan direalisasikan melalui Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebesar Rp. 276.778.352.808,70 (79,41%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
   - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
   - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
   - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
   - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
   - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pada pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan mengalami selisih harga pada negosiasi dan ada 2 kontrak yang batal (*cut off*) dikarenakan barang tidak dikirim dan barang tidak dapat berfungsi dengan baik saat uji fungsi
b. Pengadaan *Catridge* TCM senilai Rp. 844.519.550 dibekukan oleh Menteri Kesehatan, kebutuhan *catridge* TCM akan dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien bersumber dari dana APBN

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0 (Bukan Kewenangan Kota)	0 (Bukan Kewenangan Kota)
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0 (Bukan Kewenangan Kota)	0 (Bukan Kewenangan Kota)
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	43,57	36,76
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	84,37	84,98

5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	79,32	80,12
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	64,14	64,35
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	84,74	84,96
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya (2024) https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Palangka Raya sebesar pada tahun 2023 Rp. 101.851.882.576 dan direalisasikan melalui Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebesar Rp. 97.892.510.104,00 (96,11%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
   - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Pengembangan Permukiman
   - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
f. Program Penataan Bangunan Gedung
   - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

g. Program Penyelenggaraan Jalan
   - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
   - Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
   - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah

a. Terdapat beberapa paket pekerjaan yang terlambat penyelesaiannya sehingga berpengaruh pada target penyerapan anggaran.
b. Dari 11 DIR kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya yang tertuang dalam Permen PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2015, untuk pemeliharaan berkala saluran irigasi Tahun Anggaran 2023 tidak ada dilaksanakan dikarenakan keterbatasan pagu anggaran pada operasional dan pemeliharaan bidang Sumber Daya Air.
c. Dinas PUPR Kota Palangka Raya tidak memperoleh dana DAK Tahun Anggaran 2023.
d. Saluran irigasi bersifat semi permanen sehingga apabila tidak dilaksanakan pemeliharaan mengakibatkan saluran menjadi dangkal sehingga saluran tidak dapat berfungsi secara optimal dan terjadi penurunan karena saluran idealnya dipelihara tiap tahun.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	100	0

	terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	97,49	100
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,91	5,90
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya (2024) https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Anggaran urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebesar Rp. 87.837.391.084 dengan realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebesar Rp. 86.664.321.157 (98,66%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan
   - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
   - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
b. Program Kawasan Permukiman
   - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
   - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
   - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Masih perlu ditingkatkan lagi upaya dalam pengentasan rumah tidak layak huni di Kota Palangka Raya
b. Kualitas penerangan jalan umum pada permukiman

c. Optimalisasi Target PAD Dinas Perkimtan melalui tarif rumah susun

5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	83,03	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	98,23
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93,33	91,30
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,75	6,12

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya (2024), Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya (2024), Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya (2024), https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk

B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Anggaran belanja urusan Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebesar Rp. 17.230.000.000 dan direalisasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebesar Rp. 16.817.126.458,00 (97,60%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

2) Anggaran belanja urusan Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebesar Rp. 10.068.046.306 dan direalisasikan pada Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebesar Rp. 9.498.034.990,00 (94,34%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
   a. Program Penanggulangan Bencana
      - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
      - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaans Terhadap Bencana
      - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
      - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

3) Anggaran belanja urusan Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebesar Rp 11.140.715.310 dan direalisasikan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya sebesar Rp. 10.684.378.221,00 (95,90%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
   a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
      - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
      - Investigasi Kejadian Kebakaran
      - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Masih adanya ditemukan pelanggaran berkenaan dengan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan (K3) di Wilayah Kota Palangka Raya.
2) Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, masih belum memadai, hanya terdapat (dua) pos/mako Damkar. Tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilindungi.
3) Alokasi dan beban anggaran untuk sarana dan prasarana kurang memperhatikan atau tidak sebanding dengan efek kinerja yang ditimbulkan (anggaran biaya operasional terbatas).
4) Alokasi distribusi anggaran untuk sarana prasarana tidak berimbang dengan potensi kinerja dari program lain. Respon time belum, terpenuhi karena kondisi jalan dan kesadaran pengguna jalan tidak memberi kesempatan pada mobil pemadam kebakaran secara leluasa bergerak melakukan operasi pemadaman.

5) Masih lemahnya penerapan peraturan daerah tentang inspeksi proteksi alat pemadam kebakaran pada bangunan, gedung dan lingkungan.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Palangka Raya pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	99,12	99,55
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Anggaran belanja urusan Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebesar Rp 9.529.273.111 dan direalisasikan pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebesar Rp. 8.950.857.229,00 (93,93%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial
   - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Rehabilitasi Sosial
   - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
   - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pemanfaatan layanan kesejahteraan sosial seperti SLRT di tingkat kota dan PUSKESOS di tingkat kelurahan masih rendah.
b. PPKS tidak mendapatkan hak dan kebutuhan dasarnya.
c. Exclusion error (orang yang berhak menerima manfaat tetapi tidak masuk ke database) dan inclusion error (orang yang tidak berhak menerima manfaat tetapi masuk database).
d. Belum terintegrasinya data penanganan bencana.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

   a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,89 dan status kinerja Sedang.
   b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1158 dan status kinerja Sedang.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

   Berdasarkan Laporan Nomor 47.A/LHP/XIX.PAL/05/2023 Tahun 2023 Kota Palangka Raya berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang berarti Kota Palangka Raya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk yang ketujuh kalinya.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Audited/Unaudited) Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 188.363.412.814,85 (96,15%) dan Realisasi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 mencapai Rp. 1.044.031.428.999,85 (91,11%).

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Jenis Pendapatan Daerah	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	195.912.771.950	188.363.412.814,85	96,15
4.1.01.	Pajak Daerah	147.859.625.262	150.582.262.447,00	101,84
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.693.895.550	13.933.350.543,02	101,75
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.055.266.580	81.147.428,96	1,01
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	26.303.984.558	23.766.652.395,87	90,35
4.2.	**Pendapatan Transfer**	1.027.102.599.180	1.059.402.458.308,00	103,14
4.2.01.01	Dana Perimbangan	910.968.157.865	907.090.158.377,00	99,57
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	130.343.465.000	142.989.011.494,00	109,70
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	615.520.038.000	615.517.742.730,00	100,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.039.978.000	36.180.579.044,00	97,68
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	128.064.676.865	112.402.825.109,00	87,77
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.598.785.000	6.598.785.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.535.656.315	145.713.514.931,00	133,03
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	109.535.656.315	145.713.514.931,00	133,03
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0	0
4.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	11.965.771.620	11.512.941.710,00	96,22
4.3.01.	Pendapatan Hibah	2.005.000.000	1.752.906.664,00	87,43
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	9.960.771.620	9.760.035.046,00	97,98

Kode Rekening	Jenis Pendapatan Daerah	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Perundang-Undangan			
Jumlah Pendapatan Daerah		1.234.981.142.750	1.259.278.812.832,85	101,97

(Sumber : BPKAD Kota Palangka Raya sebelum audit BPK RI, data per 18 Maret 2024)

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Jenis Belanja Daerah	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.1	**Belanja Operasi**	1.145.873.773.258	1.044.031.428.999,85	91,11
5.1.01.	Belanja Pegawai	547.109.760.730	520.443.307.879,00	95,13
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	543.385.647.833	475.137.420.309,85	87,44
5.1.03.	Belanja Bunga	5.915.029.008	5.649.396.698,00	95,51
5.1.05.	Belanja Hibah	47.799.335.687	41.261.099.863,00	86,32
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.664.000.000	1.540.204.250,00	92,56
5.2.	**Belanja Modal**	312.906.342.465	281.343.767.566,00	89,91
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	19.032.536.000	4.003.383.082,00	21,03
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.647.160.148	84.884.254.418,00	89,68
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.961.971.515	111.616.449.607,00	96,25
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.142.031.945	78.792.977.882,00	97,11
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.062.642.857	1.992.109.257,00	96,58
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000	54.593.320,00 90,99	0,00
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	1.003.454.261	930.458.180,00	92,73
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1.003.454.261	930.458.180,00	92,73
5.4.	**Bantuan Keuangan**	246.689.756	245.000.000,00	99,32

Kode Rekening	Jenis Belanja Daerah	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	246.689.756	245.000.000,00	99,32
Jumlah Belanja Daerah		1.460.030.259.740	1.326.550.654.745,85	90,86

(Sumber : BPKAD Kota Palangka Raya se belum audit BPK RI, data per 18 Maret 2024)

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, Pemerintah Kota Palangka Raya mendapat Skor 47,30 dengan Predikat Inovatif.

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	ASESSMENT DAN WAWANCARA MUTASI PNS (AWASI PNS)	Mekanisme atau cara baru yang pada Bidang Mutasi BKPSDM Kota Palangka Raya yaitu pertama bekerjasama dengan Subbid Data Pegawai guna memproleh informasi Pemetaan PNS teraktual berdasarkan Data SIMPEG yang akan menampilkandata Jumlah JFT dan JFU pada SOPD beserta Jabatannya, kedua adalah Layanan Assesment dan Wawancara bagi PNS yang mengusulkan pindah atas permintaan sendiri. Layanan ini dilaksanakan dengan melibatkan tenaga Psikologi yang ada di BKPSDM Kota Palangka Raya.
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	APLIKASI BEZETTING PEGAWAI	Inovasi untuk mendukung penyebaran dan pemerataan penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan adanya kontrol dari pimpinan instansi, ASN akan bekerja lebih bertanggungjawab terhadap perkejaannya dikarenakan beban kerja yang jelas sehingga targetSKP bisa tercapai, yang nantinya juga akan menambah penghasilan dari Tunjangan Penghasilan.

(Sumber : Bappedalitbang Kota Palangka Raya, 2024)

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (*stakeholders*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan, tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Tantangan terbesar Kota Palangka Raya adalah menyiapkan Kota Palangka Raya agar dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Kota Palangka Raya **"TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah mencoba memenuhi komitmen moral, bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan harapan semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, maupun referensi sekaligus bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun mendatang.

Palangka Raya, Maret 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA

HERA NUGRAHAYU

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (*stakeholders*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan, tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Tantangan terbesar Kota Palangka Raya adalah menyiapkan Kota Palangka Raya agar dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Kota Palangka Raya **"TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah mencoba memenuhi komitmen moral, bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan harapan semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, maupun referensi sekaligus bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun mendatang.

Palangka Raya, Maret 2024

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA

AHERA NUGRAHAYU

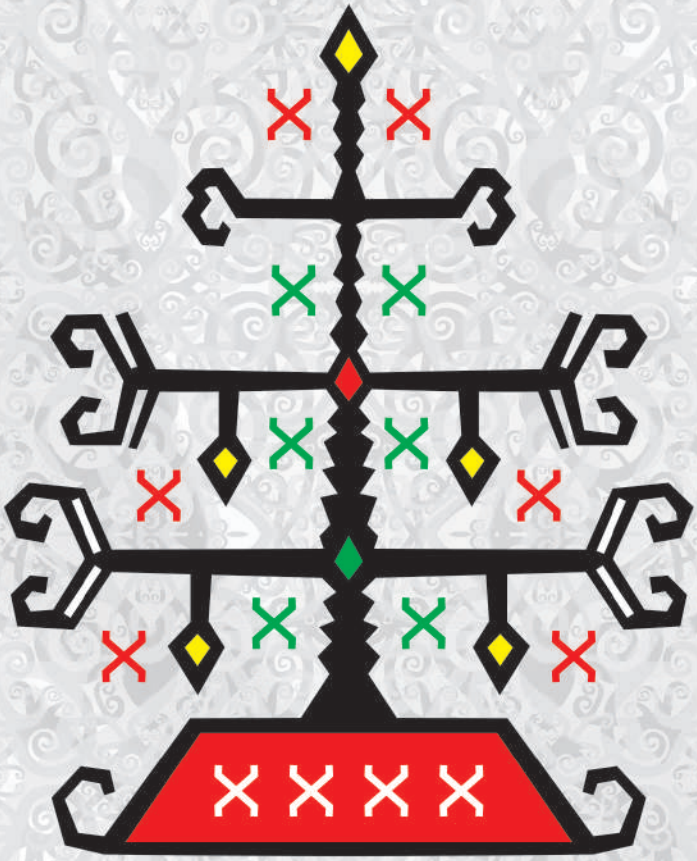

PALANGKA RAYA
Kota Cantik